


BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya *et al.*, 2013). Padahal, otonomi daerah sudah berjalan cukup lama, yakni sekitar 17 tahunan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No 18 Tahun 2016.

Melaksanakan kinerja atau hal yang baik juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya pada Q.S. Az-Zalzalah/99:7-8

 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”

 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, setiap individu yang berbuat kebaikan sekecil apapun maka akan mendapatkan balasannya. Begitu sebaliknya apabila manusia berbuat keburukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Hal tersebut harusnya menjadi dasar manusia untuk selalu berbuat baik dalam menjalankan suatu pemerintahan (amanah, bertanggungjawab, jujur, transparan) dan menghindari tindakan yang buruk (korupsi, penyelewengan, sewenang-wenang, tidak amanah). Sehingga nantinya akan menghasilkan hasil/kinerja yang baik pula.

Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan, termasuk pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat (Wiguna *et al.*,2015). Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa terdapat kaitan antara penerapan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Wiguna *et al.*, (2015) dalam penelitiannya membuktikan secara empiris bahwa pengawasan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Ismiarti (2013) dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Auditya *et al.*, (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD, semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD maka akan semakin meningkatkan kinerja.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal kinerja Pemerintah yang dinilai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja (menpan.go.id). Namun dibalik opini yang diberikan oleh BPK, pemerintah kota Yogyakarta masih memiliki masalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan beberapa temuan pada tahun anggaran 2016. Temuan tersebut diantaranya temuan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang terdapat pada rekonsiliasi data pajak yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), serta sistem informasi manajemen barang daerah yang berada di bawah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD)(jogja.antaranews.com).

Sebelumnya penelitian mengenai peran APIP dan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan Darmawiguna (2017) yang meneliti mengenai pengaruh adanya peran aparat pengawas intern pemerintah yang berpengaruh terhadap penerapan *good governance* dan implikasinya pada kinerja pemerintah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran APIP berpengaruh positif secara simultan terhadap penerapan *good governance* dan penerapan *good governance* pada kinerja pemerintah.

Penelitian terdahulu yang juga telah dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016) yang meneliti mengenai pengaruh dari adanya kegiatan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang berdampak kepada peningkatan kinerja pemerintah daerah yang berada di kabupaten Aceh Barat Daya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi keuangan pengelolaan secara simultan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Abdy.

Namun penelitian tersebut memiliki kelemahan dimana, penelitian yang dilakukan sebelumnya peran pengawasan hanya sebatas mengawasi, perubahan paradigma yang terjadi adalah peran yang dilakukan APIP tidak hanya melakukan pengawasan dan mencari-cari kesalahan (*watch dog*) melainkan telah diperluas dengan tugas yang meliputi *Assurance Activity*, *Anti corruption Activity and Advisory Activity*. *Assurance Activity* merupakan kegiatan yang dilakukan APIP untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan,

kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan instansi pemerintah. *Anti corruption Activity* meliputi pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko instansi pemerintah, sedangkan *Advisory Activity* merupakan kegiatan untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia).

Keterbaruan dari penelitian ini adalah penggabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Darmawiguna (2017) yang meneliti tentang pengaruh peran APIP terhadap penerapan *good governance* dan implikasinya pada kinerja pemerintah dan penelitian yang dilakukan oleh Purnama dan Nadirsyah (2016) yang menguji tentang pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga penelitian ini akan meneliti mengenai kinerja pemerintah sebagai variabel dependen dengan judul Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah, diantaranya adalah peran APIP, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnama dan Nadirsyah (2016) dengan memperluas lingkup variabel pengawasan dengan Peran APIP yang tidak hanya kegiatan pengawasan

(*assurance activity*) melainkan juga *advisory activity* dan *anticorruption activity*.

B. Batasan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti memutuskan untuk memberikan batasan-batasan masalah. Kinerja Pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, namun pada penelitian ini hanya difokuskan pada beberapa faktor saja. Faktor-faktor tersebut adalah peran APIP, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah SKPD yang terdapat pada kota Yogyakarta

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang, yaitu mengenai pengaruh yang diberikan oleh APIP, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, yang berimplikasi terhadap kinerja dari pemerintah daerah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah peran aparat pengawas intern pemerintah yang di jelaskan melalui *assurance activity*, *anti corruption activity* dan *advisory activity* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apakah akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Yogyakarta?

3. Apakah transparansi pada pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan penelitian tersebut adalah.:

1. Menguji secara empiris Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Menguji secara empiris Pengaruh dari Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Menguji secara empiris Pengaruh Transparansi pengelolaan keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada bidang teoritis, yakni terkait pengembangan isu tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam hal pengawasan yang telah berubah paradigma dari pengawas yang hanya sekedar mencari-cari kesalahan (*watchdog*) menjadi pengawas yang turut berpartisipasi dalam menanggulangi

adanya kesalahan atau kecurangan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui *Assurance Activity*, *Anti Corruption Activity* dan *Advisory Activity*. Serta penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bidang teoritis dalam hal transparansi dan akuntabilitas guna mencapai kinerja pemerintah yang memuaskan serta dapat menambah pengetahuan serta literatur pada masalah sejenis

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat pada bidang praktis adalah menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja, dan melakukan perbaikan untuk mendukung strategi guna mencapai visi dan misi pemerintah daerah serta mendorong penerapan *Good Government Governance* pada pemerintahan Indonesia.

